



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NADIA TARMIZI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 247561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **31.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/149 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 3.000.000.000
2. Bangunan Seluas 43.3 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/195 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 5.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 3.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/95 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 16.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.620.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, BMW X3 JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.760.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 217.895.314

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 35.647.895.314

III. HUTANG Rp. 13.984.207.759

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 21.663.687.555

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.